

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016**

Oleh : Aisya Ahma dan Lena Satlita, Universitas Negeri Yogyakarta,
e-mail : andyaisya04@gmail.com.

ABSTRAK

Lambatnya proses perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, dikarenakan belum maksimalnya peranan Bappeda Kabupaten Wonosobo dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, motivasi, dan stimulasi untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi perencanaan pembangunan ekonomi Daerah secara maksimal di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bappeda Wonosobo dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini ada empat orang, terdiri dari Sekretaris Bappeda Kabupaten Wonosobo, Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo, Kepala Desa Sorogaten Kecamatan Wonosobo, dan satu orang warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Teknik analisis dan keabsahan data penelitian ini menggunakan analisis triangulasi, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Bappeda Kabupaten Wonosobo dalam melakukan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi secara partisipatif telah melibatkan seluruh pihak mulai dari internal aparatur Bappeda Wonosobo hingga dinas-dinas terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Bappeda Wonosobo dalam melakukan koordinasi, peranan Bappeda Wonosobo melalui fasilitasi, yaitu memberikan informasi dan laporan yang dilakukan Bappeda Wonosobo melalui rapat monitoring dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, peranan Bappeda Wonosobo melalui motivasi, yaitu dalam bentuk kesepakatan dan komitmen bersama antara Bappeda Wonosobo dengan seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk menetapkan program perencanaan pembangunan ekonomi yang dianggap penting dan prioritas untuk segera diwujudkan. Peranan Bappeda Wonosobo melalui stimulasi, yaitu membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal usaha di Kabupaten Wonosobo. Kendala yang dihadapi Bappeda Wonosobo, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, dan belum terjalin dengan baik koordinasi kerja antar unit-unit di Bappeda Wonosobo, kurangnya keterlibatan unsur organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Upaya yang dilakukan Bappeda Wonosobo, yaitu mengikutsertakan aparatur Bappeda dalam pelatihan kerja, mengatasi masalah jumlah sumber daya manusia, mengadakan rapat koordinasi untuk meningkatkan profesionalitas kerja di lingkungan Bappeda Wonosobo.

Kata Kunci: Peranan, Bappeda, Pembangunan Ekonomi

THE Role of the Regional Development Planning Board in Improving the Planning Economic Development in District Wonosobo 2016 Year

By: Aisha Ahma and Lena Satlita, Yogyakarta State University,
e-mail: andyaisya04@gmail.com.

ABSTRACT

Slowness of the planning process economic development in district Wonosobo, because that has not been the role of district-level Bappeda Wonosobo in coordinating, facilitation, motivation, and stimulation to make policies or proposes the strategies economic development planning an area at regular maskimal in district Wonosobo. This study attempts to analyze the role of Bappeda Wonosobo in improving economic development planning in district Wonosobo. Design this research used methods descriptive qualitative research. Informants this research are four men, consisting of a secretary Bappeda district Wonosobo, inspectorate chief district Wonosobo, the village head sorogaten subdistrict Wonosobo, and one citizens of the community of district Wonosobo. Engineering analysis and the validity of the data was used in the research analysis triangulation, for example through phases of the reduction of the data , presentation of data, until the withdrawal of conclusion. Based on the research done can be concluded that the role of Bappeda district Wonosobo in doing the preparation of the planning activities economic development in participatory has involved all parties have been from internal apparatus Bappeda Wonosobo to associated agencies. This can be seen from the role of Bappeda Wonosobo in coordinating , the role of Bappeda Wonosobo by facilitating, namely providing information and reports done Bappeda Wonosobo through a meeting monitoring with relevant sectoral agencies that is in district Wonosobo, the role of Bappeda Wonosobo through motivation, which are in an agreement and commitment joint between Bappeda Wonosobo with all agencies that is in district Wonosobo to establish program planning economic development that are considered important and a priority to embodied immediately. The role of Bappeda Wonosobo through stimulation, it is to build a working relationship which either by all agencies that is in district Wonosobo, and interest investors to invest capital business in district Wonosobo. The obstacles Bappeda Wonosobo, that is the lack of adequate human resources, limitations on human resources, and have not interwoven with good work coordination between units in Bappeda Wonosobo, a lack of involvement element the social organizations in planning economic development in district Wonosobo. The efforts made by Bappeda Wonosobo, namely include apparatus Bappeda in job training, to overcome the problem of the number of human resource , held a meeting coordination to increase professionalism work in the neighborhood Bappeda Wonosobo.

Keywords: *Role, Bappeda, Economic Development.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD juga memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, serta indikator kinerja daerah. RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 ini merupakan tahap

ketiga dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo 2005-2025, ditetapkan visi pembangunan adalah “Wonosobo Asri dan Bermartabat” yang secara harfiah mengandung pengertian bahwa Kabupaten Wonosobo adalah wilayah yang Asri atau Aman, Sehat, Rapi dan Indah, dengan masyarakatnya Bermartabat atau Bersama Rakyat, Maju, Adil, Rahayu, Tentram, Agamis, Berbudaya, Amal dan Terpuji.

Dalam pelaksanaannya, Bappeda Wonosobo melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh dinas di Kabupaten Wonosobo melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi untuk disusun dan diatur secara terencana sebagai berikut, (1) adanya mobilitas faktor-faktor yang terkendali dalam kegiatan produksi dan pembangunan. (2) rendahnya pendapatan perkapita dan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. (3) kekuatan pasar dan mekanisme harga belum dapat

dijadikan jaminan suatu kebijakan pembangunan dalam operasionalnya (Abipraja, 2002:11).

Pembangunan ekonomi dianggap penting karena menyangkut kesejahteraan manusia yang menjalankan pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini juga termasuk pemerintah daerah. Peranan Bappeda Wonosobo sangat kompleks dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, artinya semua bidang perencanaan pembangunan ditangani di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk juga perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Peranan Bappeda Wonosobo dalam proses pembangunan di Kabupaten Wonosobo, meliputi, (1) menentukan arah koordinasi pencapaian tujuan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan atau kajian pembangunan. (2) memberikan motivasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dengan seluruh dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo. (3) memberikan fasilitasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. (4) memberikan stimulasi dalam menentukan dan menjaring seluruh informasi data pembangunan dari seluruh dinas di Kabupaten Wonosobo dalam perumusan arah perencanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Lambatnya proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, dikarenakan belum maksimalnya peranan Bappeda Wonosobo dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, maksudnya peranan Bappeda Wonosobo sebagai koordinasi untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi perencanaan pembangunan ekonomi daerah belum dijalankan secara maksimal, padahal dengan peranan Bappeda Wonosobo mampu melakukan perluasan peranannya dalam pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh dinas dan kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Bappeda Wonosobo juga belum mampu memaksimalkan peranannya dalam menentukan dan menjangkau seluruh informasi (data) dari seluruh dinas di Kabupaten Wonosobo untuk perumusan arah perencanaan pembangunan daerah, hal ini mengakibatkan proses tujuan dan pendampingan pelaksanaan analisis kebijakan dan kajian pembangunan ekonomi di kabupaten Wonosobo menjadi terhambat.

Oleh karena itu, Bappeda Wonosobo sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup terhadap penyusunan rencana,

penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan di tuntut untuk mampu secara optimal serta tetap konsisten membangun sinergisitas perencanaan pembangunan daerah terutama perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo guna mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku pembangunan serta mampu merumuskan dokumen yang operasional, informatif, aspiratif, dan sistematis guna mendorong perkembangan ekonomi daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Wonosobo.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, maksud penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara *holistik* (cara pandang) dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian ke dalam bentuk kata-kata, bahasa pada dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2012:15).

Berdasarkan fokus penelitian dan pengumpulan data-data yang telah diambil, peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara wawancara atau tanya jawab antara peneliti dengan informan penelitian,

sehingga mampu memperoleh informasi secara langsung dan mendalam.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk menganalisis peranan Bappeda Wonosobo dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama ± 3 bulan tehitung mulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016.

Peneliti melakukan wawancara dengan empat orang informan, terdiri dari: (1) sekretaris Bappeda Wonosobo. (2) Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo. (3) perwakilan Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa Sorogaten Kecamatan Wonosobo. (4) perwakilan dari warga masyarakat, selaku perwakilan warga Kabupaten Wonosobo Desa Sorogaten Kecamatan Wonosobo., yaitu menjanging informasi pembangunan yang dirasakan oleh warga. Sehingga dapat diketahui upaya apa saja yang sudah dilakukan Bappeda Wonosobo dalam menjalankan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

Teknik pemilihan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan tujuan menjanging sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan situasi yang dialami oleh informan.

Sedangkan untuk validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode pendekatan melalui observasi secara non partisipan, wawancara dengan sistem tidak terstruktur, dan mengumpulkan dokumentasi terkait aktivitas Bappeda Wonosobo dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada metode analisis dari Miles dan Huberman (2009:41) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

2. Instrumen Penelitian

Peneliti sebagai instrumen utama dibantu oleh instrumen tambahan, seperti alat bantu, pedoman wawancara, alat perekam suara serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui informasi tentang peranan Bappeda Wonosobo dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, yaitu melalui wawancara dengan Sekretaris Bappeda Wonosobo terkait peranan Bappeda dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo melalui koordinasi, fasilitasi, motivasi,

stimulasi dan kendala yang dihadapi Bappeda Wonosobo dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi daerah dan upaya yang dilakukan Bappeda dalam mengatasi kendala perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data sekunder berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025, profile Kabupaten Wonosobo, dan foto dokumentasi pada waktu proses wawancara antara peneliti dengan informan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan semi terbuka, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara (*guide interview*) yang digunakan peneliti sebagai kontrol dalam alur pembicaraan.

b. Observasi

Obsrsevasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak

ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, berupa Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025, foto dokumentasi pada waktu proses wawancara antara peneliti dengan responden penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan data primer dengan pendekatan wawancara terstruktur, dan dokumentasi berupa pengumpulan dokumen peraturan daerah, profil Kabupaten Wonosobo, dan foto kegiatan saat wawancara.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Penerapan metode triangulasi dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuannya adalah untuk membanding hasil wawancara dengan hasil dokomentasi agar tetap konsisten dan data lainnya seperti

jurnal ilmiah, penelitian yang relevan, dan teori-teori yang dapat menunjang tujuan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan sebelum dan sesudah turun ke lapangan. Analisis data sebelum turun ke lapangan dilakukan melalui data sekunder yang diterapkan pada penelitian pendahuluan. Sedangkan untuk analisis data dilapangan, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2009:16-21). Berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman, langkah-langkah dalam melakukan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Bappeda dalam Melakukan Koordinasi

Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai rencana pembangunan ke depan. Selain itu rapat koordinasi ini bertujuan untuk menilai dan menampung masalah-masalah dalam pelaksanaan program/proyek yang

berdasarkan masukan yang diterima dan dijadikan bahan yang dapat saling mengisi dan menunjang berbagai sektor pembangunan dalam suatu koordinasi perencanaan pembangunan, pelaksana dan pengawasan serta pengendalian pembangunan Daerah.

Rapat koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke tahap penyusunan arah dan kebijakan umum termasuk program perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Adapun koordinasi yang dilakukan Bappeda Wonosobo, yaitu koordinasi dengan seluruh dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan melibatkan unsur dari organisasi kemasyarakatan daerah. Bappeda Kabupaten Wonosobo juga senantiasa berkoordinasi mengenai kegiatan/program yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD. RPJMD inilah yang dijadikan "*kitab suci*" dari Bappeda Wonosobo yang tidak terlepas dari RPJMD tersebut karena merupakan kegiatan, target yang ingin dicapai oleh Bupati Wonosobo sebagai otoritas penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Wonosobo.

2. Peranan Bappeda sebagai Fasilitator

Bentuk fasilitator proses perencanaan pembangunan ekonomi

yang diberikan Bappeda Wonosobo, yaitu dengan adanya pemberian informasi dan laporan yang dilakukan oleh Bappeda Wonosobo selama ini melalui rapat *monitoring* dan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan.

Tersedianya informasi dan laporan yang akurat mengenai potensi daerah dan aspek kehidupan masyarakat akan memudahkan Bappeda Kabupaten Wonosobo dalam menyusun suatu arah kebijakan ekonomi mikro dan makro. Untuk itulah, Bappeda Wonosobo sebagai pihak yang memberikan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah senantiasa meningkatkan kerjasama tim dalam proses perencanaan pembangunan untuk mendapatkan informasi yang akurat kemudian dari informasi tersebut diolah menjadi sebuah arah kebijakan makro yang nantinya akan dilaporkan kepada seluruh dinas pemerintahan di Kabupaten Wonosobo, khususnya ditingkat pemerintahan Kabupaten.

3. Peranan Bappeda dalam Memberikan Motivasi

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, salah satu hal yang sangat penting di dalamnya adalah adanya kesepakatan dan komitmen yang disetujui dalam pelaksanaan

pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sangat dibutuhkan dalam membuat perencanaan suatu kegiatan/program perencanaan pembangunan agar apa yang sudah disepakati akan menjadi suatu program yang siap dilaksanakan. Adanya kesepakatan dan komitmen dalam perencanaan pembangunan berawal dari sejauhmana proses pemberian motivasi yang dilakukan oleh Bappeda Wonosobo kepada seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, sehingga menjadi komitmen untuk melaksanakan pembangunan daerah. Motivasi yang diberikan Bappeda Kabupaten Wonosobo ini bertujuan untuk meningkatkan kesepakatan dan komitmen yang sangat besar dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Adanya kerja sama antar pihak perencana dengan beberapa instansi pemerintahan tentu sangat membantu dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah ke depan. Kesepakatan dan komitmen itulah yang nantinya akan menjadi suatu acuan bagi seluruh dinas di Kabupaten Wonosobo dalam menyusun draft rencana kerja rencana kerja satuan perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan Bappeda Wonosobo dalam memberikan motivasi, yaitu

dalam bentuk kesepakatan dan komitmen Bappeda dengan dinas pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dimulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan untuk menetapkan program/kegiatan yang dianggap prioritas, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga inilah yang menjadi komitmen Bappeda Wonosobo dan seluruh dinas terkait untuk membuat suatu perencanaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

4. Peranan Bappeda dalam Memberikan Stimulasi

Koordinasi dan pemberian stimulasi kerja adalah dua hal yang saling terkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan pemberian stimulasi kerja yang efektif. Hubungan kerja mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam hubungan kerjanya melibatkan seluruh dinas di Kabupaten Wonosobo, lembaga-lembaga swasta serta masyarakat dimana antara satu

sama lainnya tidak berdiri sendiri melainkan memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo, maka Bappeda Kabupaten Wonosobo menempuh beberapa tahapan kerja. Tahapan-tahapan kerja di dalam merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu: *Tahapan pertama* diadakan terlebih dahulu penyusunan rencana yang dilaksanakan melalui proses (Musrenbang) untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah: 1) penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur. 2) masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3) melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. *Tahapan kedua* yaitu berdasarkan hasil penyusunan rencana yang sudah dikerjakan pada tahapan pertama

tersebut di atas, maka disusunlah suatu penetapan rencana yang menjadi stimulasi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. **Tahapan ketiga** yaitu pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh seluruh dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, selanjutnya, Bappeda Wonosobo menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. **Tahapan keempat** yaitu dilakukannya evaluasi pelaksanaan rencana sebagai bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stimulasi yang dilakukan Bappeda Wonosobo, yaitu dalam bentuk hubungan kerja yang dilakukan oleh Bappeda Wonosobo dengan seluruh dinas pemerintahan di Kabupaten Wonosobo dimulai dari proses perencanaan pembangunan.

Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk

menanamkan modal usahanya di Kabupaten Wonosobo sebagai implementasi dari proses peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

5. Kendala-Kendala yang Dihadapi Bappeda Kabupaten Wonosobo

Kendala yang dihadapi Bappeda Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo meliputi kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal antara lain:

- a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam merumuskan perencanaan program usulan pembangunan ekonomi di Bappeda Wonosobo.
- b. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki Bappeda Kabupaten Wonosobo.
- c. Belum mantapnya koordinasi antara unit-unit kerja di Bappeda Wonosobo, sehingga dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, dalam hal ini Bappeda Wonosobo masih memerlukan kerjasama dengan seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo dan unsur organisasi kemasyarakatan untuk merumuskan perencanaan

pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi Bappeda Kabupaten Wonosobo, yaitu:

- a. Rendahnya koordinasi antara Bappeda Wonosobo dengan seluruh dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo dalam merumuskan program perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo menjadi terhambat.
- b. Kurangnya peran serta unsur organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, karena adanya dominasi aspirasi politik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo dalam menentukan perencanaan pembangunan ekonomi. Hal ini mengakibatkan banyak program perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo banyak yang tidak sesuai dengan sasaran pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

6. Upaya yang Dilakukan Bappeda Wonosobo dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Wonosobo

Prioritas dan sasaran pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas SDM dengan fokus pada:
 - 1) Pendidikan:
 - Mendorong peningkatan APM SMP dan SMU/SMK.
 - Peningkatan Mutu Pendidikan di SMU level pendidikan (SD-SMU) melalui pengembangan sekolah unggulan.
 - Peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan.
 - 2) Kesehatan:
 - Melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana serta perbaikan dan peningkatan sistem layanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan Ketersediaan dan kualitas infra struktur kabupaten Wonosobo yang secara sinergis mendorong pengembangan ekonomi dan juga mengatasi permasalahan kabupaten.

- Peningkatan kualitas konstruksi dan pelebaran jalan Kota.
 - Peningkatan ketersediaan air bersih, energi listrik dan persampahan.
- c. Penanggulangan pembangunan ekonomi melalui penataan/normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan melalui:
- Peningkatan produksi dan produktifitas sektor kelautan dan perikanan.
 - Peningkatan usaha kecil dan menengah melalui penguatan permodalan, *skill* dan peluang pasar.
 - Pengembangan sektor pariwisata melalui efisiensi fungsi-fungsi obyek wisata di kabupaten Wonosobo secara terintegrasi dengan usaha-usaha mikro masyarakat.
 - Optimalisasi program-program pengentasan kemiskinan agar lebih efektif dan fokus.

Kabupaten Wonosobo dalam melakukan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi secara partisipatif telah melibatkan seluruh pihak mulai dari internal aparat Bappeda Wonosobo hingga dinas-dinas terkait. Hal ini dapat dilihat dari peranan Bappeda Wonosobo dalam melakukan koordinasi, peranan Bappeda Wonosobo melalui fasilitasi, yaitu memberikan informasi dan laporan yang dilakukan Bappeda Wonosobo melalui rapat monitoring dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, peranan Bappeda Wonosobo melalui motivasi, yaitu dalam bentuk kesepakatan dan komitmen bersama antara Bappeda Wonosobo dengan seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk menetapkan program perencanaan pembangunan ekonomi yang dianggap penting dan prioritas untuk segera diwujudkan. Peranan Bappeda Wonosobo melalui stimulasi, yaitu membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal usaha di Kabupaten Wonosobo. Kendala yang dihadapi Bappeda Wonosobo, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, dan belum terjalin dengan baik koordinasi kerja antar unit-unit di Bappeda Wonosobo, kurangnya keterlibatan unsur organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Upaya yang dilakukan Bappeda Wonosobo, yaitu mengikutsertakan aparat Bappeda dalam pelatihan kerja, mengatasi masalah jumlah sumber daya

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa peranan Bappeda

manusia, mengadakan rapat koordinasi untuk meningkatkan profesionalitas kerja di lingkungan Bappeda Wonosobo.

Saran

Dari pembahasan tentang peranan Badan dalam Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Wonosobo, maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo haruslah melihat pada kemampuan masyarakat dan sumber potensi yang dimiliki Kabupaten Wonosobo.
2. Perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo yang dilakukan harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas bukan hanya kepentingan golongan masyarakat tertentu.
3. Bappeda Kabupaten Wonosobo harus menjalin kerjasama yang lebih solid dengan seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan unsur organisasi kemasyarakatan, hingga jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dalam menjalankan tugas dan peranannya melalui tugas dan

fungsinya bisa lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miles, M.B dan Huberman, M.A. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Abipraja, Soedjono. 2002, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen serta Strategi*. Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

REGULASI DAN DOKUMEN KHUSUS

- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.